

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan Indonesia terutama pada bidang-bidang tertentu, seperti sektor yang berfokus pada pengelolaan publik dapat ditandai dengan keberadaan tuntutan masyarakat yang bersifat akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga dan instansi publik, baik yang berada di pemerintahan pusat maupun daerah. Reformasi ini sangat memberikan dampak signifikan dalam perkembangan akuntansi khususnya sektor publik, dengan berbagai cara agar tercapai sistem akuntansi pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya. Pemerintah harus mengerjakan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang digunakan sehingga keuangan suatu negara dapat mengalami berbagai macam perubahan mendasar dalam bidang-bidang tertentu yang tentunya dapat memberi dampak positif berupa dukungan reformasi, yang mana dapat meningkatkan jalannya suatu sistem keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai panduan atas laporan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup basis kas yaitu untuk pengukuran dan pengakuan pendapatan dan

belanja, sedangkan basis akrual untuk pengukuran dan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Kedua basis tersebut digunakan untuk merencanakan sebuah pelaporan keuangan sehingga pemerintah dapat melakukan peran aktif pada pemerintah daerah dalam mengelola daerah tersebut.

Akuntansi pemerintah adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyediakan sebuah informasi yang bersifat kuantitatif khususnya yang bersifat keuangan dari sebuah entitas pemerintah dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi yang nalar dari berbagai pihak yang berkepentingan yang berdasar atas berbagai alternatif tindakan (Halim, 2007). Tugas akuntansi pemerintahan dan keuangan pemerintahan sangat berkaitan, maka dari itu sistem dan proses yang selama ini diaplikasikan dalam akuntansi pemerintahan telah menimbulkan berbagai masalah yang menghambat tercapainya *good governance* dalam perealisasi sistem pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki peran aktif dalam mengelola daerah tersendiri, karena merupakan tantangan yang memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah demi dicapainya pembangunan dan pengelolaan sistem daerah yang bekerja semestinya.

Hak dan kewajiban daerah sudah sepantasnya diambil alih dan berada penuh dibawah kendali suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola kemampuan finansial suatu daerah, dimana hal tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa faktor diantaranya ialah pembuatan skema atau rencana, kemudian bagaimana hal tersebut akan dilaksanakan, penatausahaan,

pemberian laporan mengenai sistem yang telah direalisasikan, dan juga adanya tanggung jawab serta dana yang terus berada dalam pengawasan.

Salah satu bagian dari pemerintahan yang termasuk dalam lingkup hak pengelolaan ialah adanya kemampuan pemerintah untuk mengadakan pajak pada suatu daerah, disusul dengan adanya retribusi dan juga pemberian pinjaman, hak dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yakni dengan melakukan pembayaran tagihan terhadap pihak luar yang juga memiliki kepentingan. Hak untuk pemerintah daerah, dibagi menjadi beberapa poin penting, yang mencakup hak untuk mengeluarkan dana pada proyek tertentu, hak untuk mengelola sumber daya daerah yang tentu saja dapat dilaksanakan secara mandiri maupun dengan adanya campur tangan pihak ketiga atau lebih, hal inilah yang mencakup surat berharga, piutang, uang, materi, dan juga beberapa hak lain yang memiliki nilai jual setara, salah satunya ialah materi yang tidak termasuk pada perusahaan daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyajikan sebuah pengetahuan finansial yang mana sangat dibutuhkan keberadaannya secara spesifik, akurat, selalu ada di waktu yang tepat, dan memiliki kredibilitas yang tinggi.

Penerapan skema struktur akuntansi pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan melalui peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Berdasarkan peraturan tersebut, Standar akuntansi pemerintah merupakan sebuah prinsip akuntansi yang diaplikasikan pada penyusunan serta penyajian pelaporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam SAP Berbasisi AkruaI dimaksud berpedoman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 23, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan instansi pemerintahan disusun masing-masing instansi yang meupakan suatu entitas pelaporan atau entitas akuntansi dari sudut pandang akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 tahun 2010 entitas pelaporan harus menyusun tujuh laporan keuangan yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan arus Kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan sebagai entitas akuntansi, terdapat lima jenis laporan keuangan yaitu; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tersebutlah yang nantinya akan menjadi indikator atau standar kualitas kerja sistem pemerintah daerah khususnya dalam bidang yang mengelola aset finansial. Pada laporan keuangan, salah satu bagian yang

merupakan paling penting dan keberadaannya wajib untuk ada dalam laporan keuangan yaitu *track-record* terhadap Catatan Laporan Keuangan atau biasa disebut CaLK yang merupakan ungkapan naratif dari komponen pelaporan keuangan, sehingga dapat dipahami serta mudah dimengerti oleh *stakeholders*. Laporan keuangan LPP TVRI NTT dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Penyusunan laporan keuangan LPP TVRI NTT mengacu pada PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan sebagai entitas akuntansi terdapat lima jenis laporan keuangan pada LPP TVRI NTT yaitu; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menurut kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintah berdasarkan fenomena-fenomena tersebut

menimbulkan dugaan sesuai atau tidaknya penyusunan laporan keuangan pada LPP TVRI NTT dengan standar yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh TVRI stasiun Nusa Tenggara Timur. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari laporan realisasi, anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.

Permasalahan timbul karena adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 seperti pos-pos atau item-item laporan keuangan yang tidak dilaporkan secara terperinci. Masih adanya kekurangan pencatatan yaitu pada laporan realisasi anggaran untuk periode 2019-2021 yang mencatat hanya pendapatan dan belanja saja tidak terdapat pencatatan transfer, surplus dan defisit.

Berpatokan pada berbagai macam hal yang telah dijabarkan pada latar belakang, penulis pun memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut

terhadap kasus tersebut dikarenakan penulis yang merasa hal ini sangatlah menarik hingga dilakukanlah penelitian di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) NTT untuk mengetahui model dan juga bagaimana laporan keuangan daerah tersebut dijalankan. Berdasarkan hal tersebutlah penulis pun mengajukan judul yang berjudul “Analisis Penerapan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) NTT “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Lembaga Penyiaran Publik TVRI NTT berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI NTT ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui laporan keuangan pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia TVRI NTT sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian Laporan keuangan mengikuti aturan PP No. 71 Tahun 2010.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyajian laporan keuangan Lembaga Penyiaran Publik TVRI NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis memahami dan menambah wawasan mengenai penyajian laporan keuangan pada LPP TVRI NTT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta memahami kendala dalam meningkatkan kinerja Instansi.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta referensi penelitian selanjutnya.